

ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011

Fathiyah¹

Abstract

Analysis of Jambi Provincial Government Expenditure In 2011 performed using Analysis of Variance, Growth Ratio Analysis, Ratio Analysis Harmony Shopping, Spending Efficiency Ratio Analysis, and Ratio Analysis Expenditure to GDP.

The results of the analysis of all the ratios above indicate that there is efficiency in all parts of regional spending in 2011, and in accordance with the concept of value for money. Overall mean performance Jambi Provincial Government budget year 2011 rated as good.

Keyword : *Local Expenditure anylisis, Local Expenditure Ratio, Efficiency.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan RI merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya.

Tujuan pemberian otonomi daerah pada hakekatnya untuk memberikan keleluasaan serta kesempatan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya Mardiasmo (2004) mengatakan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan perekonomian dan masyarakat daerah, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas. Berdasarkan skala prioritas tersebut pemerintah daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang salah satunya isinya mewajibkan pemerintah membuat Laporan Keuangan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, neraca, Laporan Aliran Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (Ranperda Provinsi Jambi, 2012)

Belanja daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Laporan Realisasi Anggaran, hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (public fund) berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah (Mahmudi, 2007)

Belanja daerah sangat rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan,

pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting untuk dilakukan. Belanja daerah setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran biasanya dianalisis untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan publik, namun karena jumlah dana yang terbatas memaksa Pemerintah Provinsi Jambi untuk menggunakan belanja publik agar lebih tepat sasaran, efisien dan efektif sesuai dengan konsep value for money.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 apakah penggunaannya sudah efisien dan efektif sesuai dengan konsep value for money ?

LANDASAN TEORI

Menurut Mardiasmo (2002) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Menurut Halim dan Damayanti (2007) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah, mencegah overspending, underspending dan salah pengalokasian anggaran serta memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah (Halim dan Damayanti, 2007).

Dalam bukunya Halim dan Damayanti (2007) menuliskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari :

¹ Dosen Fak. Ekonomi Universitas Batanghari

1. Pendapatan Daerah, semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
2. Belanja Daerah, semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah
3. Pembiayaan, transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara ekonomis, efisien dan efektif (value for money) (Mahmudi, 2007).

Menurut Mahmudi (2007) analisis belanja daerah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1}$$

3. Analisis Kecerasan Belanja
Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Analisis kecerasan belanja antara lain berupa

$$\text{Rasio Belanja Per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi} \dots}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan Rasio Belanja Operasi Thd Total Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Merupakan perbandingan antara Total Realisasi Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Berdasarkan rasio ini pembaca laporan keuangan mengetahui Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- d. Analisis Belanja Lansung dan Tidak Lansung
Analisis proporsi Belanja Lansung dan Tidak Lansung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah Rasio Belanja Lansung thd Total Belanja =

$$\frac{\text{Total Belanja Lansung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tdk Lansung Thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tdk Lansung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4. Rasio Efisiensi Belanja
Merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentase. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu 1) selisih disukai (favourable variance) dan 2) selisih tidak disukai (unfavourable variance). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggaran maka disebut favourable, sedangkan jika lebih besar maka dikategorikan Unfavourable.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan dan penyesuaian faktor-faktor ekonomi. Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus berikut :

- a. Analisis Belanja Per Fungsi terhadap Total Belanja

Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. Rasio Belanja Per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut :

kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut ;

porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Rasio Belanja Modal dirumuskan sebagai berikut :

daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (cost and budgetary control). Rasio Belanja Lansung dirumuskan sebagai berikut :

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio Efisiensi Belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

5. Rasio Belanja terhadap PDRB

Merupakan perbandingan antara Total Belanja Daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah.

$$\text{Total Belanja Daerah Thdp PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

PEMBAHASAN**1. Analisis Varians**

Untuk mengetahui hasil analisis varians, maka

dapat dilihat dari ilustrasi pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 berikut ini :

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ berkurang	
			(Rp)	%
Belanja	1.938.926.763.736,00	1.750.241.856.160,33	(188.684.907.576,02)	90,27
Belanja Operasi	1.022.101.802.851,35	937.020.137.960,50	(85.081.664.890,85)	91,68
Belanja Pegawai	492.099.075.272,35	454.759.630.155,00	(37.339.445.117,35)	92,41
Belanja Barang	443.670.280.331,00	403.019.557.757,50	(40.650.722.573,50)	90,84
Belanja Subsidi	370.000.000,00	135.000.000,00	(235.000.000,00)	36,49
Belanja Hibah	25.058.147.248,00	22.187.375.500,00	(2.870.771.748,00)	88,54
Belanja Bantuan Sosial	59.969.300.000,00	55.988.739.100,00	(3.980.560.900,00)	93,36
Belanja Bantuan Keuangan	935.000.000,00	929.835.448,00	(5.164.552,00)	99,45
Belanja Modal	612.030.188.437,00	518.750.581.050,00	(93.279.607.387,00)	84,76
Belanja Tanah	3.220.000.000,00	2.882.666.300,00	(337.333.700,00)	89,52
Belanja Peralatan & mesin	113.210.024.150,00	108.470.534.679,00	(4.739.489.471,00)	95,81
Belanja Bangunan & gedung	101.445.575.987,00	96.495.747.828,00	(4.949.828.159,00)	95,12
Belanja Jalan, Irigasi & jarnng	392.759.498.300,00	309.553.243.893,00	(83.206.254.407,00)	78,81
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.395.090.000,00	1.348.388.350,00	(46.701.650,00)	96,65
Belanja Tak Terduga	13.370.000.000,00	3.125.150.000,00	(10.244.850.000,00)	23,37
Belanja Tak terduga	13.370.000.000,00	3.125.150.000,00	(10.244.850.000,00)	23,37
Belanja Transfer	291.424.772.448,00	291.345.987.149,83	(78.785.298,17)	99,97
Bagi Hasil/Pajak	287.916.397.943,00	287.837.612.645,00	(78.785.298,00)	99,97
Bagi Hasil/Retribusi	3.508.374.505,00	3.508.374.504,83	(0,17)	100
Surplus/Defisit	(303.260.384.056,35)	328.565.057.630,50	631.825.441.686,85	(108,3)

Berdasarkan tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2011 diatas secara umum terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif, hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran atau disebut juga selisih favourable. Anggaran belanja tahun 2011 terserap 90,27%. Penghematan anggaran belanja pada tahun 2011 sebesar Rp. 188.684.907.576,02 atau

9,08% dari total APBD, jumlah penghematan tersebut dilihat dari persentase tidak begitu besar, namun jika dilihat nilai nominalnya efisiensinya cukup signifikan sehingga dapat dikatakan kinerjanya baik.

2. Analisis Pertumbuhan

Untuk melihat pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011 adalah pada tabel dibawah ini.

Tabel Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2011

Realisasi Belanja Tahun 2010	Realisasi Belanja Tahun 2011	Pertumbuhan (%)
Rp. 1.488.130.349.597,62	Rp. 1.750.241.856.160,33	17,62

Berdasarkan ilustrasi tabel diatas, secara keseluruhan pertumbuhan belanja daerah Tahun 2011 adalah sebesar 17,62% dari tahun sebelumnya dengan belanja yang paling besar mempengaruhi kenaikan pertumbuhan belanja adalah belanja pegawai dan Belanja Barang, kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dengan inflasi, pertambahan jumlah penduduk, penyesuaian faktor-faktor ekonomi

dan perbedaan kurs rupiah di tahun 2011, sehingga dapat dikatakan kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran.

3. Analisis Kerasian Belanja**a. Rasio Belanja Per Fungsi**

Rasio Belanja Per Fungsi digunakan untuk mengetahui pola orientasi pengeluaran pemerintah daerah, berikut Tabel yang menggambarkan Rasio Belanja Per Fungsi

Tabel Rasio Belanja Per Fungsi pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

Fungsi	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)
Pelayanan Umum	689.831.095.280,33	39,42
Ketertiban dan Keamanan	17.215.813.205,00	0,99
Ekonomi	209.161.527.369,00	11,95
Lingkungan Hidup	7.522.230.825,00	0,43
Perumahan dan Fasilitas Umum	422.748.306.420,00	24,16
Kesehatan	196.740.122.257,00	11,24
Pariwisata dan Budaya	17.564.300.692,00	1,01
Pendidikan	173.464.142.859,00	9,91
Perlindungan Sosial	15.994.317.253,00	0,92
	1.750.241.856.160,33	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan Rasio Belanja Per Fungsi Pemerintah Provinsi Jambi sudah melaksanakan prioritas belanja dengan mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum, namun rasio ini masih dianggap relatif kecil, karena semestinya alokasi belanja diprioritaskan untuk perbaikan indeks

Tabel Belanja Operasi terhadap Total Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Tahun 2011	Rasio (%)
Rp. 937.020.137.960,00	Rp. 1.750.241.856.160,33	53,54

Berdasarkan tabel diatas Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2011 adalah sebesar 53,54%, belanja ini merupakan belanja yang habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran dan sifatnya jangka pendek. Umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total Belanja Daerah yaitu 60 – 90%. Belanja Operasi untuk Pemerintah

Tabel Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Tahun 2011	Rasio (%)
Rp. 518.750.581.050	Rp. 1.750.241.856.160,33	29,64

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah adalah sebesar 29,64% artinya alokasi belanja daerah untuk investasi dalam belanja daerah adalah 29,64%. Belanja Modal bersifat jangka panjang dan mempengaruhi neraca Pemerintah Daerah yaitu menambah Aset Daerah. Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah umumnya adalah antara 5 - 20%, karena Pengalokasian Belanja Modal pada Belanja Daerah Provinsi Jambi diatas 20% berarti

Tabel Rasio Belanja Lansung dan Tidak Lansung terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

Realisasi Belanja Lansung	Realisasi Belanja Tahun 2011	Rasio (%)
Rp. 989.902.384.414,50	Rp. 1.750.241.856.160,33	56,56
Realisasi Belanja Tdk Lansung	Realisasi Belanja tahun 2011	Rasio
Rp. 760.339.471.745,83	Rp. 1.750.241.856.160,33	43,45

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya rasio Belanja Lansung terhadap Total Belanja Daerah adalah 56,56% dan rasio Belanja Tidak Lansung terhadap Total Belanja Daerah adalah sebesar 43,45%.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan Belanja Tidak Lansung merupakan belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Umumnya Belanja langsung lebih besar porsinya daripada Belanja Tidak Lansung, sebab Belanja langsung sangat

Tabel Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

Anggaran	Realisasi	Rasio (%)
Rp. 1.938.926.763.736,35	Rp. 1.750.241.856.160,33	90,27

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa tahun 2011 Belanja Pemerintah Daerah adalah sebesar 90,27% berarti menghemat anggaran sebesar 9,73%. Tidak ada standar

pembangunan manusia (*human development index*) dimana sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi menduduki prioritas yang utama.

b. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Berikut adalah tabel Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011.

c. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Berikut ini adalah tabel perbandingan Realisasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011.

d. Rasio Belanja Lansung dan Tidak Lansung terhadap Total Belanja Daerah

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Rasio Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011.

mempengaruhi kualitas output kegiatan. Untuk Provinsi Jambi rasio belanja langsung lebih besar daripada rasio belanja tidak langsung berarti kualitas output kegiatannya meningkat dan ada efisiensi pada Belanja tidak langsung, sehingga dapat dikatakan kinerjanya baik dan dimasa yang akan datang diharapkan ada peningkatan efisiensi belanja tidak langsung.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Berikut ini tabel yang menunjukkan Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011

baku yang dianggap baik untuk rasio ini, hanya saja besaran rasio diatas dianggap efisien karena rasio efisiensinya kurang dari 100%, karena secara normatif jumlah

anggaran belanja adalah batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan.

5. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Tabel Rasio Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi terhadap PDRB Tahun 2011

Realisasi Total Belanja	PDRB	Rasio (%)
Rp. 1.750.241.856.160,33	Rp. 18.960.000.000.000	9,24

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB masih relatif kecil yaitu sebesar 9,24%, artinya produktivitas dan efektivitas belanja daerah terhadap PDRB adalah sebesar 9,24%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah Pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomi, efisien dan efektif (value for money). Dalam melakukan evaluasi tersebut dilakukan analisis-analisis berikut yaitu :
 - Analisis Varians
 - Analisis Rasio Pertumbuhan
 - Analisis Rasio Kesenjangan Belanja
 - Analisis Rasio Efisiensi Belanja
 - Analisis Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB
- Berdasarkan Hasil Analisis-analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 - Hasil analisis varians menunjukkan bahwa terjadi penghematan anggaran belanja tahun 2011 sebesar Rp. 188.684.907.576,02 atau 9,08% dari total APBD, walaupun secara persentase tidak begitu besar tetapi secara nominal efisiensinya cukup signifikan, sehingga dapat dikatakan kinerjanya baik.
 - Hasil analisis pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan belanja daerah tahun 2011 adalah sebesar 17,62% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini masih dalam batas kewajaran karena adanya penyesuaian inflasi, penambahan jumlah penduduk dan perbedaan kurs rupiah di tahun 2011.
 - Hasil analisis Rasio Belanja Per Fungsi menunjukkan Pemerintah Provinsi Jambi sudah melaksanakan prioritas belanja dengan mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi serta perumahan dan fasilitas umum, namun rasio ini masih dianggap relatif kecil, karena untuk perbaikan indeks pembangunan manusia semestinya lebih memprioritaskan belanja sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
 - Hasil analisis rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja menunjukkan sebesar 53,54%. Dengan nilai tersebut dimana umumnya dominasi belanja operasi terhadap total belanja 60 – 90%, maka terjadi efisiensi pada Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2011.
 - Hasil analisis Rasio belanja Modal terhadap Total Belanja tahun 2011 sebesar 29,64%, dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja umumnya 5 – 20%, maka dapat dikatakan kinerjanya baik karena ada efisiensi pada belanja rutin dan ada peningkatan pada belanja untuk menambah aset daerah serta investasi.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rasio Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi terhadap PDRB Tahun 2011

- Hasil analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah menunjukkan kinerja yang baik karena secara umum proporsi Belanja Langsung harus lebih besar dari Proporsi Belanja Tidak Langsung, yaitu dengan rasio Belanja Langsung 56,56% dan Rasio Belanja Tidak langsung 43,45%, berarti ada efisiensi pada belanja tidak langsung dan ada peningkatan pada kualitas output kegiatan.
- Hasil Analisis Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan adanya penghematan anggaran di tahun 2011 karena rasio efisiensinya kurang dari 100% dengan penyerapan anggaran tahun 2011 adalah sebesar 90,27%.
- Hasil analisis Rasio Belanja terhadap PDRB tahun 2011 menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah terhadap PDRB masih relatif kecil yaitu sebesar 9,24%.

Saran

- Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jambi di masa yang akan datang lebih meningkatkan lagi alokasi belanja fungsi sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk mendukung perbaikan indeks pembangunan manusia karena raionya masih dikategorikan relatif kecil.
- Walaupun terlihat pada seluruh komponen belanja terjadi efisiensi pada tahun 2011, tetapi sebaiknya Pemerintah Provinsi Jambi menekan pengeluaran yang sifatnya rutin seperti menekan Belanja Tidak Langsung dan memperbesar rasio Belanja Langsung sehingga ada peningkatan pada kualitas output kegiatan dan dampaknya langsung terasa pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Prof,Dr,MBA,Akt dan Theresia Damayanti,SE.,M.Si,Akt, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Mardiasmo,DR, MBA, Akt, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo,DR, MBA, Akt, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2007, Penerbit UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011*